UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implikasi CitiGov dalam Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Proses Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Bantul terhadap Biaya Kepatuhan
Risteta Ellita Rizky, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bohari. Pengantar Hukum Pajak. Cetakan Ke-10. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Cetakan Ke-9. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, 2006.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2018.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Cetakan Ketiga. Depok: Rajawali Pers, 2017.

HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mustaqiem. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2008.

Mustofa. *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*. Cetakan Ketiga (Edisi Revisi). Yogyakarta: Karya Media, 2014.

Negara, Tunggul Anshari Setia. *Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Malang: Setara Press, 2017.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implikasi CitiGov dalam Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Proses Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Bantul terhadap Biaya Kepatuhan
Risteta Ellita Rizky, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Cetakan Ke-6. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. *Perpajakan Indonesia - Mekanisme & Perhitungan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

C. Jurnal

I Wayan Mustika Utama, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *E-Jurnal*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implikasi CitiGov dalam Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Proses Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Bantul terhadap Biaya Kepatuhan
Risteta Ellita Rizky, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Akuntansi, No. 2 (Februari 2013): 452-470, https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4850/3637.

D. Internet

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. "CitiGov". https://bpkd.acehtamiangkab.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-online/citigov#:~:text=Citigov%20adalah%20aplikasi%20yang%20berbasis,bagi%20masyarakat%20sebagai%20wajib%20pajak. (diakses 3 Oktober 2024).

CitiGov. "FAQ CitiGov". https://citigov.id/faq (diakses 3 Oktober 2024).

CitiGov. "Klien CitiGov". https://citigov.id/ (diakses 3 Oktober 2024).

CitiGov. "Pelayanan". https://citigov.id/citizen/pelayanan-create (diakses 2 Oktober 2024).

CitiGov. "Tentang CitiGov". https://citigov.id/#about (diakses 3 Oktober 2024).

E. Tesis

Guk-Guk, Dejan Gumelar Raja. "Efektifitas Validasi BPHTB terhadap Ketidaksesuaian Nilai Objek Pajak dalam Akta Jual Beli dengan Harga Sebenarnya", *Tesis*, Universitas Medan Area, 2021.

Kusuma, MA Arindita. "Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dan PPAT dalam Proses Validasi E-BPHTB di Kabupaten Kulon Progo Ditinjau dari Asas *Certainty* dan Asas *Efficiency*", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2023.

F. Lain-lain

Materi Perkuliahan Mata Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum oleh Sudjito pada tanggal 8 Mei 2023.

Mustofa, Seminar Nasional Universitas Gadjah Mada "e-PHTB dan e-BPHTB pada Proses Validasi Pajak dalam Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan", di Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 18 November 2023.

Titin Fathonah, Seminar Nasional Universitas Gadjah Mada "e-PHTB dan e-BPHTB pada Proses Validasi Pajak dalam Pengalihan Hak atas

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implikasi CitiGov dalam Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Proses Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Bantul terhadap Biaya Kepatuhan
Risteta Ellita Rizky, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tanah dan Bangunan", di Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 18 November 2023.

Wawancara dengan Edi Minarso, Notaris-PPAT Kabupaten Bantul, di Kantor Notaris-PPAT yang bersangkutan pada tanggal 5 November 2024.

Wawancara dengan Harmidarto, Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Keberatan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul, di Kantor BPKPAD Kabupaten Bantul pada tanggal 19 Agustus 2024.

Wawancara dengan Harmidarto, Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Keberatan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul, di Kantor BPKPAD Kabupaten Bantul pada tanggal 26 November 2024.

Wawancara dengan Heri Sabto Widodo, Notaris-PPAT Kabupaten Bantul, di Kantor Notaris-PPAT yang bersangkutan pada tanggal 14 Agustus 2024.